

CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

I. BASIC DATA

Organization Legal Name: Darmanto

Project Title (as stated in the grant agreement): Develop and Implement Conservation Collaboration Model to Save Siberut National Park

Implementation Partners for this Project: Balai Taman Nasional Siberut (BTNS), UNESCO, Yayasan Citra Mandiri (YCM), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Conservation International Indonesia (CII), Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Pouliggoubat.

Project Dates (as stated in the grant agreement): November 1, 2006-June 30, 2007

Date of Report (month/year): August 30, 2007

II. OPENING REMARKS

Provide any opening remarks that may assist in the review of this report.

Project ini merupakan proses lanjutan dari rekomendasi hasil assessment project Kolaboratif Manajemen di Balai Taman Nasional Siberut antara Balai Taman Nasional Siberut (BTNS)—UNESCO—Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Citra Mandiri)—dan masyarakat Siberut. Assesment tersebut di danai oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan diimplementasikan oleh Antonius Djogo. Hasil rekomendasi kajian tersebut adalah perlunya transformasi project Kolaboratif Manajemen menjadi lebih formal dan mendapat dukungan secara resmi dari otoritas kawasan taman Nasional dan perlunya melegalkan organisasi berbasis masyarakat (*Community Based Organization*, CBO) agar proses kolaborasi di BTNS menjadi lebih kuat.

Penguatan proses kolaborasi antara BTNS dan mitra tersebut tersebut membutuhkan 3 syarat; adanya mekanisme kelembagaan untuk masyarakat yang berbentuk *community based organization* (CBO). Kelembagaan untuk CBO ini diharapkan memiliki landasan atau badan hukum; terbentuknya suatu perencanaan strategis (*strategic planning*) bersama oleh masyarakat dan CBO bersama BTNS yang menjamin mekanisme kolaborasi yang jelas; peningkatan kapasitas bagi CBO dan staf BTNS untuk memahami dan menjalankan agenda-agenda kemitraan konservasi pulau Siberut.

Capaian utama project ini adalah; mendapatkan dukungan institusi BTNS dan Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) untuk skema dan format kolaborasi bersama CBO dari masyarakat; terbentuknya secara legal CBO dalam proses kolaborasi dengan BTNS; terbentuknya dokumen *strategic planning* CBO dengan BTNS yang mendapatkan dukungan PHKA/MoF dan berkelanjutan.

III. ACHIEVEMENT OF PROJECT PURPOSE

Project Purpose: Balai Taman Nasional Siberut menjalankan sistem pengelolaan kawasan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang berkembang di Siberut tanpa meninggalkan prinsip-prinsip konservasi.

Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
Purpose-level:	

<p>1. <i>Workplan TNS sesuai dengan masukan dari masyarakat dan CBO.</i></p>	<p><u>Setiap tahun BTNS menyusun Workplan yang akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) dalam bentuk Daftar Isian Proyek dan Anggaran (DIPA) Skema DIPA harus diajukan satu tahun sebelum implementasi program. DIPA BTNS tahun 2008 sudah dibuat. Proses penyusunan DIPA 2008 sangat partisipatif bahkan sangat transparan mengingat CBO dan masyarakat terlibat dalam penyusunan usulan kegiatan yang diajukan DIPA dan proses penyeleksian kegiatan prioritas—bahkan dilibatkan dalam evaluasi penyusunan anggaran.</u></p> <p><u>Proses penyusunan usulan kegiatan yang diajukan dalam DIPA 2008 melibatkan Staf PASIH Alexius Samailleppet dan juga technical advisory dari Yohannes Napitupulu dari UNESCO. Draft kegiatan yang ditulis dalam DIPA pertama-tama diusulkan oleh staf BTNS di masing-masing seksi pengelolaan taman nasional setelah mengadakan pertemuan kampung. Usulan dalam bentuk draft ini diajukan ke kantor BTNS di Padang yang bertugas untuk mensistematiskan menjadi draft DIPA yang siap diajukan.</u></p> <p><u>Draft DIPA kemudian dibahas bersama antara staf senior, jajaran pimpinan BTNS dan bagian perencanaan. Dalam penyusunan DIPA BTNS tahun 2008, CBO terlibat dalam penyeleksian kegiatan DIPA dalam penyusunan final konsinyasi DIPA di Anai Resort 17-18 Juni 2007.</u></p> <p><u>Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan CBO yang diakomodasi dalam DIPA BTNS antara lain:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan kelompok petani 2. Pendampingan masyarakat dalam pengembangan agroforestry untuk solusi ekonomi, 3. Ekspose kegiatan dan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan multilevel stakeholders, 4. Fasilitasi magang tentang pengembangan agroforestry untuk masyarakat petani, 5. Pengembangan jaringan dan kemitraan,
<p>2. <i>TNS (ex officio) menjadi board CBO</i></p>	<p>Rencana awal salah satu anggota board CBO akan diisi oleh staf senior BTNS. Ini didasari atas pertimbangan akan memudahkan dalam perumusan-perumusan kerjasama. Akan tetapi setelah melalui diskusi dengan Staff BTNS dan konsultasi dengan LSM yang memiliki pengalaman bekerjasama dengan</p>

	<p>lembaga pemerintah yang otoritasnya terpusat seperti Balai Taman Nasional Siberut (BTNS), Board CBO tidak diisi oleh staf BTNS.</p> <p>Keputusan ini melalui pembicaraan antara BTNS dan CBO mengingat pengalaman staf dari birokrasi pemerintah menjadi komponen fungsional bagi lembaga non-pemerintah yang menjadi mitra lembaga dimana dia bekerja akan mengalami <i>conflict of interest</i>. Berdasarkan pengalaman BTNS, penunjukkan staf untuk terlibat menjadi kompinen fungsional bagi organisasi lain atau sebuah project di luar BTNS berpotensi untuk menjadi pemicu konflik internal. Untuk menghindari hal tersebut, BTNS dan CBO bersepakat untuk tidak melibatkan staf BTNS untuk menjadi board CBO.</p>
<p>3. Pihak BTNS terlibat penuh dalam “strategic planning” CBO.</p>	<p>Pihak BTNS terlibat dalam penyusunan Strategic planning CBO yang dilakukan pada tanggal 21-23 Juli 2007 di Anai resort. Staf BTNS yang ikut terlibat dalam penyusunan Strategic planning cbo adalah senior staf BTNS dan sekaligus staf kunci BTNS. Terdapat tiga staf BTNS yang mengikuti penyusunan strategic planning yakni staf senior (Ahmad Munawir), jajaran fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (Yuhan Sahri—merangkap bendahara BTNS), dan polisi hutan (Athos).</p> <p>Pada penyusunan strategic planning, CBO juga meminta secara khusus kepala BTNS, Ir. Rusmaharmidi Chamli dan staf senior bagian perencanaan keproyekan (Ir Yunaidi) untuk memberi masukan dan membantu CBO untuk merumuskan strategic planning. Akan tetapi keduanya tidak bisa mengikut acara tersebut karena pada saat yang bersamaan harus mempersiapkan konsinyai Daftar Isian Proyek (DIPA) yang harus diajukan kepada Dirjen PHKA.</p>

Describe the success of the project in terms of achieving its intended impact objective and performance indicators.

Balai Taman Nasional Siberut (BTNS) lebih terbuka dalam menyusun program atau workplan. Berdasarkan atas pengalaman menyusun DIPA, baru kali ini BTNS melibatkan masyarakat dan mitranya secara langsung dalam pengusulan kegiatan dan penyeleksian DIPA yang diajukan ke PHKA. Sejauh ini workplan BTNS disusun diatas meja oleh sedikit staf BTND bagian perencanaan. Proses yang dilalui sangat tertutup. Lazimnya, program-program yang disusun sangat dipengaruhi oleh program-program bersifat umum dan nasional seperti pengamanan, pengendalian kebakaran hutan atau patroli kehutanan. Kebijakan yang disusun dari pusat di Jakarta, sering tidak kontekstual dengan situasi di taman nasional siberut yang lebih membutuhkan pendekatan sosial mengingat karakteristik kebudayaan dan sistem tenurial dan hak ulayat.

Keterbukaan BTNS dalam menyusun workplan dengan mengundang CBO membuka peluang reformasi birokrasi BTNS untuk lebih terbuka, peduli terhadap konteks lokal dan workplan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan DIPA 2008, orientasi BTNS relatif mengakomodasi kebutuhan masyarakat seperti pelatihan untuk petani, pendampingan petani, pengembangan skema agroforestry dan merintis kemitraan dengan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Mentawai.

Melalui workplan 2008, BTNS dapat membuka peluang untuk mengharmoniskan hubungan dengan masyarakat yang sejauh ini kerap diwarnai konflik. BTNS juga mulai berani untuk terbuka dengan secara transparan membuka kesempatan bagi mitra untuk mengetahui 'dapu' BTNS dalam menyusun anggaran program. Proses ini merupakan langkah penting bagi perubahan perilaku birokrasi di BTNS untuk lebih terbuka dan akuntabel kepada publik.

Begitupun sebaliknya, CBO juga membuka diri bagi keterlibatan BTNS untuk terlibat dalam program-program yang akan diimplementasikan melalui penyusunan *strategic planning*. Hal ini juga merupakan sebuah terobosan bagi organisasi non-pemerintah untuk secara terbuka membangun program-program berdasarkan masukan atau kritik dari lembaga pemerintah. Dengan proses saling terlibat dalam penyusunan masing-masing program, CBO dan BTNS telah membangun proses pertanggung jawaban, pembagian wewenang dan keuntungan dalam proses kolaboratif. Kepentingan masing-masing lembaga di negosiasikan dalam bentuk program secara terbuka. Ini merupakan langkah yang sangat positif untuk memikul tanggung jawab pengelolaan konservasi secara bersama. Sehingga kerja-kerja yang ditanggung masing-masing pihak lebih ringan.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Keterlibatan staf dari pemerintah untuk menjadi komponen bagi struktural dan fungsional di lembaga yang menjadi mitranya akan membuka potensi konflik kepentingan. Jika terjadi sengketa, staf tersebut akan mewakili kepentingan siapa? Oleh karena itu pada purpose level, pelibatan staf BTNS menjadi board bagi CBO tidak dapat dipenuhi. Akan tetapi tidak terlaksananya purpose yang ketiga ini menghindarkan adanya blunder dalam membangun kemitraan.

IV. PROJECT OUTPUTS

Project Outputs: Enter the project outputs from the Logical Framework for the project
Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
<p>Output 1: Didapatnya dukungan institusi dari BTNS dan PHKA untuk skema dan format kolaborasi bersama CBO dari masyarakat</p>	
<p>1.1. Pernyataan tertulis dari Kepala BTNS untuk mendukung skema dan format kolaborasi CBO.</p>	<p>Pernyataan tertulis dari Kepala BTNS didapatkan. Dukungan terhadap skema dan prinsip kolaborasi antara BTNS dan CBO diresmikan melalui surat Kepala BTNS tertanggal 13 September 2006 dengan nomor surat KT.2006 b/IV.T.2/TV/2006.</p> <p>Surat tersebut berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai proses kolaborasi antara BTNS dengan masyarakat yang didukung oleh UNESCO Kantor Jakarta 2. Dukungan keberlanjutan proses kolaborasi yang diperluas dengan mitra lokal dan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengurangi konflik kepentingan dalam usaha konservasi Siberut pengelolaan pulau Siberut. 3. Jaminan dukungan BTNS secara kelembagaan untuk keberlanjutan kerja kolaborasi konservasi di pulau Siberut.

<p><i>1.2. Pernyataan tertulis dari DG PHKA untuk mendukung proses kolaborasi di Siberut.</i></p>	<p>Surat pernyataan Direktorat Jenderal PHKA sudah didapatkan. Surat ini merupakan bentuk komitmen Dirjen PHKA terhadap prinsip-prinsip kerja kolaborasi konservasi BTNS dan CBO. Dukungan ini semakin kuat setelah wakil dari Dirjen PHKA menghadiri pemaparan kolaborasi konservasi selama lima tahun (2001-2006) di kantor DG PHKA yang didukung oleh UNESCO kantor Jakarta.</p> <p>Melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur PHKA tersebut Dirjen PHKA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi di Siberut 2. Mendokumentasikan proses pelaksanaan project Ko-Manajemen sebagai bahan pembelajaran dalam mengidentifikasi pihak-pihak kunci dalam memperluas spectrum kolaborasi pengelolaan BTNS yang memiliki kompleksitas dan dinamika yang tinggi. 3. Mengembangkan alternative pemanfaatan kawasan Taman Nasional dengan melakukan studi dan aktivitas pemanfaatan hasil hutan non-kayu (Non-Timber Forest Products)
<p><i>1.3. Perjalanan BTNS dan stakeholder di Siberut ke lokasi terdapat kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dan kunjungan ke lapangan</i></p>	<p>Kegiatan ini merupakan bentuk belajar dari model kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Sebelum kegiatan studi banding dilakukan, CBO mengidentifikasi beberapa tempat yang cukup strategis dan sesuai dengan karakteristik tantangan dan peluang konservasi dalam konteks perubahan sosial budaya di Pulau Siberut. Yang paling utama adalah bagaimana bisa mencari lokasi yang terdapat inisiatif masyarakat dalam bekerjasama dengan lembaga pemerintah. Ada beberapa daerah yang diidentifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Nasional Gunung Leuser 2. Dampingan Warung Konservasi (WARSI) di Taman Nasional Bukit Dua Belas 3. Di Gunung Simpang. 4. Taman Nasional Tesso Nilo. <p>Setelah melalui beberapa pertimbangan dan diskusi dengan BTNS dipilih lokasi studi banding di Taman Nasional Tesso Nilo. Pemilihan lokasi studi banding di Taman Nasional Teso Nilo dengan pertimbangan beberapa alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kolaborasi penyelamatan hutan Riau oleh LSM lokal, internasional, pemerintah, dan masyarakat lokal 2. Terdapat proses panjang kemitraan antar komponen tersebut dalam meletakkan dasar-dasar pembentukan Taman Nasional Teso Nilo 3. Dukungan pemerintah daerah terhadap usaha konservasi hutan Riau dan pembentukan Taman Nasional Teso Nilo sangat kuat

	<p>4. Adanya dukungan global dari LSM internasional (WWF), nasional, dan pemerintah provinsi Riau dalam mengkatalis pembentukan organisasi sipil yang memiliki visi konservasi seperti Forum Teso Nilo dan Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalalahari).</p> <p>Staf BTNS yang ikut dalam pelaksanaan studi banding merupakan orang kunci di BTNS, mereka adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Rusmaharmidi Chamli (Kepala Balai Taman Nasional Siberut) 2. Ahmad Munawir, S.Hut (Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Selatan Selatan) 3. Uchang Suparman, S.Sos (Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Siberut Utara) 4. Siti Wahyuna (Staf Pengendali Ekosistem) 5. Satriadi (Staf Polisi Kehutanan) <p>Staf CBO yang terlibat dalam kegiatan studi banding:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joseph Napitupulu 2. Alexius Samaileppet 3. A.T.A. Widio Utomo 4. Indah Fajarwati <p>Hasil studi banding:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesepahaman tentang proses panjang dalam membangun kemitraan antara pemerintah, LSM dan masyarakat yang mendorong penyelamatan hutan, yang diwujudkan dalam perubahan tata guna lahan dari kawasan hutan produksi terbatas menjadi sebuah kawasan konservasi (Taman Nasional Teso Nilo) 2. Pengelolaan Taman Nasional membutuhkan dukungan dari dunia internasional sekaligus penerimaan dari masyarakat lokal 3. Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan peran aktif multi pihak 4. Adanya komitmen dan spirit Taman Nasional Teso Nilo untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya penyelamatan hutan Riau 5. Perlunya katalis dan mediator dalam menjembatani proses pembentukan kemitraan dan pembentukan jaringan antara LSM dan pemerintah <p>Pelaksanaan studi banding menggunakan metode diskusi dan kunjungan lapangan ke kawasan Taman Nasional Teso Nilo dan kelompok dampingan WWF yang mengusakan produksi madu lebah asli di Lubuk Kembang Bunga. Aspek penting dalam pelaksanaan studi banding ini adalah adanya bukti bahwa konservasi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan masyarakat. Kelompok usaha madu lebah asli ini masih terkendala dengan aspek pemasaran.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Camat Siberut Selatan yang rencananya dilibatkan dalam kegiatan ini tidak jadi terlibat karena Camat meminta surat resmi dari BTNS. BTNS tidak bisa mengeluarkan surat ini karena kegiatan ini bukan merupakan kegiatan BTNS tetapi sebuah project kolaboratif.</p>
<p>1.4. Adanya dukungan sebagian masyarakat terhadap skema dan format kolaborasi</p>	<p>Masyarakat di target sasaran Ko-Manajemen masih mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh CBO yang akan terbentuk. Dengan skema dan format yang berbeda, masyarakat masih tetap memberikan dukungan kepada CBO. CBO sudah melakukan perjalanan ke dusun sasaran pada bulan November 2006, hasil dari perjalanan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat masih mendukung kegiatan CBO walaupun ada perubahan struktur dan mekanisme kegiatan dari Ko-Manajemen 2. Terdapat kesediaan anggota masyarakat yang menjadi anggota CBO. <p>Masyarakat sering menanyakan tentang keberlanjutan kegiatan ketika staf CBO membawa berkunjung ke daerah target sasaran Ko-Manajemen.</p>
<p>Output 2: Terbentuknya secara legal CBO (Community Based Organization) dalam proses kolaborasi dengan BTNS.</p>	
<p>2.1. Akta pendirian CBO beserta struktur, visi, misi.</p>	<p>CBO secara resmi dan legal didirikan pada tanggal 22 April 2007, bertepatan dengan hari Lingkungan hidup sedunia. CBO memilih model kelembagaan berbentuk Perkumpulan. Perkumpulan dipilih karena Nama yang dipilih oleh staf CBO adalah Perkumpulan Siberut Hijau atau disingkat PASIH.</p> <p>PASIH memilih model kelembagaan dalam bentuk perkumpulan karena model ini lebih cocok dengan konteks kerja PASIH berdasar pada pengalaman dengan Ko-Manajemen selama lima tahun. Model perkumpulan ini dipilih setelah melalui proses perumusan yang relatif panjang di tingkat PASIH dan juga konsultasi lembaga-lembaga yang lebih berpengalaman dalam kerja-kerja bersama masyarakat Siberut seperti Yayasan Citra Mandiri, Walhi Sumatra Barat, Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatra Barat, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia di Padang dan individu-individu yang memiliki sejarah dan pengalaman kerja konservasi di pulau Siberut. Struktur pengurus PASIH terdiri dari Badan pengurus dan Majelis anggota. Struktur Badan Pengurus PASIH untuk masa dua tahun. Nama-nama anggota PASIH sebagai pendiri untuk pertama kalinya adalah Darmanto, Alexius Samaileppet, Yohannes Napitupulu, Indah</p>

	<p><u>Fajarwati, Joseph Napitupulu, Andreas Seppungan, Erlina Saleleubaja, Aloysius Widyo Utomo.</u></p> <p>Untuk pertama kalinya Badan pengurus PASIH terdiri dari: <u>Darmanto (Ketua), Indah Fajarwati (Sekretaris), Alexius Samaileppet (Bidang kerjasama masyarakat), Joseph Napitupulu (Bidang Administrasi dan keuangan), Andreas Seppungan (Bidang perhubungan dan logistik).</u></p> <p>PASIH telah didaftarkan ke notaris pada tanggal 24 Mei 2007 melalui Akta No.10 yang dibuat dihadapan notaris/P.P.A.T Rismadona, SH dan sudah terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang No.04/2007.</p> <p><u>VISI</u> "Terciptanya keselarasan pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Pulau Siberut".</p> <p><u>MISI</u> "Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dengan senantiasa menghargai nilai-nilai sosial budaya".</p> <p><u>STRATEGI ANTARA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan PASIH melalui peningkatan kapasitas staf dalam rangka menuju kemandirian (contoh: kewirausahaan sosial, finansial, kelembagaan, ilmu pengetahuan, dll) 2. Mendorong penguatan program kemitraan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan belajar dari proses pembangunan di pulau Siberut. 3. Pemberdayaan ekonomi yang ramah lingkungan melalui intervensi mikro di tingkat masyarakat. 4. Meningkatkan kesadaran para pihak terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
<p>2.2. <i>MoU antara CBO dan BTNS.</i></p>	<p>MoU antara BTNS dan CBO belum ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pembahasan MoU membutuhkan proses yang panjang. Pembahasan mengenai Mou sudah dimulai pada saat diskusi antara BTNS dan CBO pada tanggal 31 Januari 2007 mengenai model kerjasama yang akan disepakati. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan Draft MoU. Draft MoU telah mengalami 2 kali pembahasan dan 2 kali revisi. Pada bulan Pebruari dan Mei diadakan pertemuan batara BTNS dan CBO untuk merevisi draf MoU yang diajukan masing-masing pihak</p> <p>Sampai project yang didukung oleh CEPF ini</p>

	<p>berakhir per 31 Juni 2007, MoU ini masih dalam pembahasan. Meskipun project dengan CEPF telah berakhir, agenda perumusan MoU antara BTNS dan CBO terus berjalan. Pada Bulan Juli 2007, MoU antara CBO dan BTNS sudah mendekati draft akhir yang akan dibahas dan ditandatangani pada minggu pertama September 2007.</p>
<p>2.3. Adanya analisis kapasitas anggota CBO dan BTNS.</p>	<p>Analisa kapasitas anggota CBO dan BTNS dilaksanakan pada bulan Januari oleh Pusat Informasi Lingkungan Hidup (PILI), sebuah Organisasi Non-pemerintah yang berkantor di Bogor. Hasil Analisa PILI berupa dokumen analisis kebutuhan peningkatan kapasitas.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan mengukur dan menganalisa kapasitas staf CBO dan BTNS yang akan membentuk suatu mekanisme kerjasama sebagai dasar untuk menentukan jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan baik melalui pelatihan, studi banding, atau kegiatan lainnya yang dibutuhkan dalam konteks konservasi Pulau Siberut.</p> <p>Terdapat Tujuh jenis kapasitas—yang sebagian sudah dimiliki oleh staf CBO dan BTNS—namun perlu ditingkatkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan, teknik dan ketrampilan fasilitasi di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi dalam memetakan perencanaan strategis baik internal dan ditingkat masyarakat; ▪ Fasilitasi dalam memobilisasi psikologi massa untuk membangun nilai-nilai, kesadaran kritis dan pengelolaan sumber daya alam; ▪ Fasilitasi di level birokrasi pemerintah 2. Manajemen kelembagaan (administrasi, keuangan dan pelaksana teknis kegiatan); <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kejelasan struktur kelembagaan, termasuk posisi dan peran strategis masing-masing unit pelaksanaannya (tugas, wewenang dan tanggung jawab); ▪ Kejelasan prosedur operasional standar 3. Networking (kemitraan); Rangkaian peningkatan kapasitas dalam membangun kemitraan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan pengetahuan dan wawasan mengenai konsep-konsep kerjasama dan kemitraan ▪ Pelatihan penyusunan pola kemitraan ▪ Pelatihan pemetaan sekaligus <i>leveling</i> kemitraan dan kerjasama yang akan dikembangkan 4. Penggalangan dana; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan di tingkat lokal, nasional dan

	<ul style="list-style-type: none"> internasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman terhadap karakter sumber-sumber pendanaan serta peningkatan keahlian dalam membuat proposal ▪ Peningkatan kemampuan bernegosiasi untuk mengakses potensi pendanaan 5. Pengetahuan teknik, dan ketrampilan Penanganan Konflik; kemampuan menganalisa dan pemetaan para pihak yang berkonflik; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan baik strategis dan teknis dalam mengelola konflik 6. Kampanye (termasuk advokasi); <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemahaman mengenai kampanye dan advokasi dengan berbagai bentuknya untuk menyusun strategi kampanye dan advokasi yang efektif ▪ Peningkatan kapasitas membuat kriteria dan indikator yang jelas dan terukur ▪ Peningkatan kemampuan teknis dalam mengelola sebuah kampanye dan advokasi dengan menggunakan potensi yang ada. 7. Dokumentasi dan informasi. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengetahuan mengenai sistem pengelolaan informasi yang disesuaikan dengan rencana strategik ▪ Peningkatan keterampilan dalam membuat, mengumpulkan dan memilih informasi sesuai dengan kebutuhan internal untuk mengambil kebijakan dan kebutuhan eksternal untuk menunjang kegiatan kampanye dan advokasi.
<p>3.1. <i>Pertemuan kampung untuk mengidentifikasi program strategis.</i></p>	<p>Pertemuan kampung secara rutin dilaksanakan di 4 dusun yakni Madobak, Rokdok, Ugai dan Gotap. Tiga dusun pertama merupakan daerah sasaran yang telah lama bekerjasama dengan CBO dan BTNS melalui program Ko-Manajemen. Sementara dusun Gotap merupakan kampung yang baru akan diinisiasi untuk menjadi daerah sasaran baru. Pertemuan kampung di Madobak, Rokdok dan Ugai dilaksanakan 2 bulan sekali. Yang pertama pada tanggal 6-11 Desember 2006; kedua 13-18 Pebruari 2007; dan 21-28 April 2007. Untuk dusun Gotap dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2007 secara intensif.</p> <p>Hasil pertemuan kampung menjadi bahan dasar untuk menentukan rencana strategic CBO yang dilaksanakan pada 21-23 Juni 2007. Pada pertemuan tersebut terdapat beberapa harapan masyarakat dari kehadiran CBO.</p> <p>1. CBO kelak diharapkan untuk melakukan kegiatan yang berorientasi peningkatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekonomi</p>

	<p>dipandang sebagai agenda utama karena tingkat ekonomi masyarakat masih rendah sementara sumber daya alam yang tersedia sangat cukup.</p> <p>2. CBO dan BTNS diharapkan membantu memanfaatkan lahan untuk pengembangan pertanian tanaman komersial</p> <p>3. Kegiatan yang akan diimplementasikan CBO dan BTNS adalah menguatkan kapasitas para petani dengan memberikan intervensi teknis dengan mengadakan pelatihan pertanian, penyediaan bibit, dan peningkatan kapasitas melalui studi banding.</p> <p>3. Kegiatan yang akan diimplementasikan harus dapat dirasakan oleh semua kompinen masyarakat secara merata, sesuai dengan prinsip egaliter masyarakat Mentawai di Pulau Siberut dimana perlu pertimbangan pemerataan dalam mendapatkan manfaat program.</p>
<p>3.2. Proses pembuatan dokumen “strategic planning” yang mengikut sertakan BTNS, CBO dan masyarakat.</p>	<p>Pembuatan dokumen strategic planning untuk masa lima tahun (2008-2012) telah dilaksanakan di Anai Resort pada tanggal 21-23 Juni 2007. Kegiatan ini dibantu oleh PILI (Pusat Informasi Lingkungan Indonesia) sebagai fasilitator. Proses pembuatan dokumen melibatkan seluruh staf CBO, perwakilan dari masyarakat dan staf BTNS dan juga staf UNESCO. Staf CBO yang terlibat 4 orang yakni Aleksius Samaileppet, Joseph Napitupulu, Darmanto, Indah Fajarwati. Staf BTNS yang mengikuti kegiatan ini 3 orang (Achmad Munawir, Yuhan Syahri, dan Athos). Wakil dari dusun Gotap adalah Aloysius Widya Utama dan staf UNESCO yang terlibat adalah Johannes Napitupulu.</p> <p>Proses penyusunan <i>strategic planning</i> dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang akan dilaksanakan CBO selama 5 tahun pertama. Hasil rumusannya adalah:</p> <p><u>GOAL</u> “Terciptanya keselarasan pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Pulau Siberut”.</p> <p><u>TUJUAN UMUM</u> “Tercapainya Pengelolaan Sumberdaya Alam secara berkelanjutan dalam konteks perubahan sosial”.</p> <p><u>STRATEGI JANGKA PANJANG</u> “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan dengan senantiasa menghargai nilai-nilai sosial budaya”.</p> <p><u>STRATEGI</u> 1. Penguatan kelembagaan PASIH melalui</p>

	<p>peningkatan kapasitas staf dalam rangka menuju kemandirian (contoh: kewirausahaan sosial, finansial, kelembagaan, ilmu pengetahuan, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong penguatan program kemitraan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan belajar dari proses pembangunan di pulau Siberut. 3. Pemberdayaan ekonomi yang ramah lingkungan melalui intervensi mikro di tingkat masyarakat. 4. Meningkatkan kesadaran para pihak terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. <p>Terdapat empat Keluaran strategis PASIH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kapasitas dan pengetahuan kelembagaan PASIH Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan peningkatan pengetahuan, teknik dan keterampilan fasilitasi pengorganisasian masyarakat, pengelolaan & penanganan konflik. b. Pelatihan peningkatan administrasi kesekretariatan dan keuangan termasuk SOP c. Pelatihan pengembangan jaringan (teknik pendekatan dan koordinasi) d. Pelatihan teknis kampanye e. Pelatihan dokumentasi (laporan database) dan pengelolaan perpustakaan 2. Pengembangan berbagai inisiatif dan alternatif pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan wanatani (agroforestry) dengan mengadopsi sistem perladangan di masyarakat b. Mengembangkan etnowisata dan ekowisata berbasis budaya masyarakat dan penelitian 3. Pengembangan kapasitas dan pengetahuan para pihak ditingkat lokal dalam mempromosikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menemukanali (mengidentifikasi dan menganalisa) kebutuhan dan pengembangan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) berbagai pihak di lokasi terpilih 4. Mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak terhadap tantangan pengelolaan sumber daya hutan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kemitraan untuk memperluas jaringan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>b. Membangun kesepakatan para pihak tertentu (BTNS dan YCM) dalam strategi dan metode pelaksanaan program dan kegiatan</p>
<p>3.3. Pembuatan, pelaksanaan dan monitoring rencana kerja yang disepakati bersama oleh BTNS dan CBO</p>	<p>Kegiatan ini telah dibahas dan didiskusikan dua kali antara BTNS dan CBO pada tanggal 22 dan 27 Pebruari 2007. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan mekanisme kerjasama antara BTNS dan CBO. Kedua belah pihak bersepakat bahwa monitoring rencana kerja akan dimasukkan dalam dokumen Memorandum of Understanding (MoU). Monitoring rencana kerja minimal akan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, diluar pertemuan evaluasi tahunan.</p>
<p>3.4. Pembuatan proposal berdasarkan strategic planning yang disepakati bersama.</p>	<p>CBO yang telah resmi menjadi PASIH sudah membuat proposal yang didasarkan atas hasil penyusunan <i>strategic planning</i>. Berdasarkan atas keluaran strategik nomor 3, yakni pengembangan berbagai inisiatif dan alternatif pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, PASIH telah membuat 3 proposal pengembangan alternatif ekonomi melalui skema pengembangan agroforestry. Proposal yang pertama disubmit ke Stichting Ommersteyn. Proposal itu diajukan dengan durasi pembiayaan selama 4 tahun (2008-2012). Secara lisan Ommersteyn berkomitmen untuk membantu program PASIH. Proposal yang kedua, yang lebih difokuskan kepada penguatan kapasitas para petani, PASIH mengajukan kepada program Small grant Program Global Enviromental Facility (SGP-GEF). Proposal itu telah diterima oleh pengelola program SGP-GEF dan PASIH menunggu konfirmasi.</p> <p>Proposal yang ketiga adalah proposal bersama yang dibuat oleh PASIH dan BTNS yang diajukan kepada Departemen Kehutanan dalam rangka rencana pengembangan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar konservasi di wilayah BTNS. Proposal ini menitikberatkan kegiatan agroforestry di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional. Daerah sasaran yang akan diajukan untuk implementasi program adalah Dusun Sirisurak di desa Saibi dan di desa Sagulubbek. Proposal ini telah sedang diajukan dan keputusan penerimaan oleh Departemen Kehutanan akan diberikan pada bulan Januari 2008</p>
<p>Output 4: Terlaksananya serial training/pelatihan yang diberikan kepada pelaksana program kunci di CBO dan BTNS yang didukung oleh partner (CII program Siberut, PILI).</p>	
<p>4.1. Serial Pelatihan Manajemen dan resolusi konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk CBO</p>	<p>Pelatihan ini tidak bisa dilaksanakan. CBO bermaksud untuk melibatkan seluruh staf untuk terlibat dalam pelatihan dengan tema ini. Selain itu diharapkan pelatihan ini memberikan penanganan konflik tenurial yang berlangsung dalam</p>

	<p>pengelolaan kawasan konservasi di Siberut. Akan tetapi fasilitator atau lembaga yang fokus menangani kegiatan dan diminta oleh CBO untuk memberikan pelatihan di Siberut agar dapat memahami dan mengenali konteks resolusi konflik ini tidak dapat memenuhi permintaan CBO untuk datang ke pulau Siberut. Sementara mencari waktu yang sesuai dimana seluruh anggota CBO dapat terlibat dalam kegiatan ini juga tidak di dapatkan.</p> <p>Pelatihan yang dilakukan untuk staf CBO yang memiliki tema dan dapat diikuti semua anggota adalah pelatihan mengenai metode dasar-dasar gerakan sosial, pengorganisasian dan penanganan konflik massa yang dilakukan di Padang tanggal 26-29 Januari 2007. Pelatihan ini merupakan pelatihan bagi masyarakat yang mengalami masalah atau mengalami konflik yang disebabkan oleh sengketa perebutan akses terhadap sumber daya alam. Pelatihan ini diorganisasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat bersama jaringan rakyat seluruh Sumatra Barat dan melibatkan komunitas-komunitas adat.</p> <p>Selain pelatihan dasar-dasar gerakan sosial, pengorganisasi dan penanganan konflik massa, CBO juga mengirim stafnya untuk mengikuti pelatihan teknik budidaya madu. Salah satu staf CBO dikirim ke Pematang Siantar untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 13 Juni - 27 Juni 2007. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Kehutanan Pematang Siantar. BTNS yang memiliki jaringan dengan Balai Diklat ini merekomendasikan salah satu staf PASIH agar bisa terlibat dalam kegiatan ini. Peserta pelatihan berasal dari daerah yang berbeda dengan tingkat pemahaman tentang budidaya madu yang beragam. Selain diberikan materi tentang budidaya madu peserta juga melakukan praktek dari proses pengambilan lebah madu dialam, pemindahan kalori lebah madu ke glodok, pemanenan lebah madu, dan juga pengenalan jenis-jenis pakan lebah madu.</p> <p>Pelatihan ini dilaksanakan karena sesuai dengan hasil pertemuan kampung dan perumusan <i>strategic planning</i>, lebih diprioritaskan kegiatan yang berorientasi ekonomi, ramah lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Siberut. Sementara itu madu telah lama menjadi produk hasil hutan non-kayu dari pulau Siberut, terutama Siberut Utara yang menghasilkan pendapatan rumah tangga yang penting bagi masyarakat Siberut. Akan tetapi pemanfaatan dan proses produksinya relatif masih sederhana dan kurang intensif sehingga diperlukan suatu input</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	teknik budidaya lebah madu yang lebih meningkatkan produksinya. Melihat peluang permintaan madu yang semakin besar, CBO mengirim stafnya untuk mengikuti pelatihan ini.
<i>4.2. Pelatihan manajemen keuangan bagi anggota CBO</i>	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada bulan Nopember 2006, dimana project yang didukung oleh CEPF sedang di ajukan, UNESCO Kantor Jakarta mengadakan pelatihan manajemen keuangan kepada CBO dan Yayasan Citra Mandiri di Padang. Pelatihan manajemen keuangan dan administrasi bagi staf CBO dialihkan kepada
<i>4.3. Serial pelatihan resolusi konflik dan manajemen taman nasional bagi staf taman nasional</i>	Pelatihan ini belum dapat dilaksanakan selama waktu project CEPF. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini tidak ada mengingat aktivitas yang dilakukan sepanjang Januari-Juni relatif berdekatan dan kegiatan yang padat juga dialami oleh staf BTNS. Meskipun demikian, kegiatan ini akan menjadi kegiatan prioritas BTNS dan dimasukkan dalam rencana kerja BTNS yang tercantum dalam DIPA 2008.
<i>4.4. Pelatihan pengembangan organisasi dan pembuatan proposal untuk anggota CBO</i>	<p>Pelatihan pembuatan proposal telah diikuti oleh staf CBO di Sungai Penuh Kerinci pada tanggal 6-9 Februari 2007. Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama antara UNESCO Kantor Jakarta, Wild life Conservation Society (WCS), dan Conservation Training Resources Center (CTRC) dan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat.</p> <p>Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas LSM dalam hal mendokumentasikan kegiatan dan mengemas hasil kegiatan tersebut menjadi sebuah proposal yang menghasilkan pendanaan konservasi.</p> <p>Seluruh staf CBO mengikuti pelatihan pelatihan team building, dasar-dasar dan pengembangan organisasi. Pelatihan ini difasilitasi oleh staf UNESCO Kantor Jakarta pada tanggal 21-24 Maret 2007 di Kantor BTNS di Maileppet, Pulau Siberut. Pelatihan, membantu staf CBO untuk merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kenapa Organisasi ini penting? 2. Alasan-alasan seseorang bekerja untuk sebuah Organisasi ini? 3. Kenapa Organisasi konservasi penting untuk pulau Siberut? 4. Apa prinsip-prinsip yang harus dipunyai dalam kerja di Organisasi? 5. Prinsip-prinsip dasar Organisasi.
<i>4.5. Pelatihan mengenai kontekstualisasi UU kehutanan dan hukum adat dalam pengelolaan taman nasional Siberut untuk Staf Taman Nasional Siberut</i>	Pelatihan mengenai kontekstualisasi UU kehutanan dan hukum adat dalam pengelolaan taman nasional Siberut untuk staf BTNS tidak dapat dilaksanakan. Mengingat kebutuhan penyusunan program BTNS dan CBO lebih mendesak dan penting. Secara rutin BTNS harus mengisi Daftar Isian Proyek pada pertengahan

	<p>tahun yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) pada tengah tahun dan batasnya pada tahun 2007 adalah tanggal 31 Juni 2007 dan juga CBO akan menyusun Rencana Strategic. Dengan alasan tersebut diputuskan oleh BTNS dan CBO untuk mengalihkan kegiatan pelatihan yang diajukan dalam proposal ini menjadi kegiatan Pelatihan penyusunan program bagi BTNS dan CBO. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari (19-20 Juni 2007) di Anai Resort. Pusat Informasi Lingkungan Hidup (PILI) menjadi fasilitator untuk kegiatan ini. Kegiatan ini fokuskan pada pelatihan analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, threat) untuk staf CBO dan BTNS.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Describe the success of the project in terms of delivering the intended outputs.

Keberhasilan project ini yang paling utama adalah berhasil membangun dan menentukan kelembagaan bagi CBO untuk menjadi Perkumpulan Siberut Hijau (PASIH). Dengan menjadi PASIH, CBO memiliki status dan badan hukum yang jelas yang diakui secara hukum. PASIH telah dideterminasikan dan juga memiliki kelengkapan organisai seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Prosedur, Struktur Kepengurusan dan dokumen strategik yang menjadi acuan untuk implementasi program selama 5 tahun.

Project ini juga berhasil meyakinkan Dirjen PHKA bahwa kerja-kerja kolaborasi konservasi di Siberut sangat penting dengan melibatkan masyarakat. Dirjen PHKA membuat surat untuk mendukung kerjasama BTNS dengan mitra, terutama masyarakat. Dukungan kebijakan dari PHKA disambut dengan dukungan kelembagaan secara resmi dari BTNS. Meskipun BTNS telah membangun kemitraan selama 5 tahun terakhir, mereka belum pernah secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa ada dukungan secara formal melalui sebuah keputusan dari kepala balai. Adanya surat dukungan tersebut mewajibkan seluruh komponen BTNS untuk mendukung kemitraan. Project ini juga sukses menginisiasi suatu nota kesepahaman yang mbingkai kerja-kerja kolaborasi antara BTNS dan CBO.

Selain itu, keberhasilan project ini adalah menjadi jembagan bagi CBO untuk mengembangkan diri. Dengan dukungan dari CEPF, CBO yang terbentuk ini berhasil merumuskan dokumen *strategic planning*. Dokumen ini sangat oenting bagi keberlanjutan CBO karena dengan dasar *strategic planning* ini, CBO juga berhasil mengkreasikan bebarapa proposal untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Proposal yang telah diajukan mendapat respon dari Stichting Ommersteyn, dari Belgia sehingga memberi jaminan keberlanjutan usaha-usaha konservasi di pulau Siberut.

Were any outputs unrealized? If so, how has this affected the overall impact of the project?

Serial pelatihan yang menjadi bagian peningkatan kapasitas staf CBO dan BTNS untuk mendukung proses kolaborasi konservasi di Pulau Siberut tidak semuanya berhasil dilaksanakan. Terutama Serial pelatihan resolusi konflik dan manajemen taman nasional bagi staf taman nasional konflik dan konteks pelatihan mengenai kontekstualisasi UU kehutanan dan hukum adat dalam pengelolaan taman nasional Siberut untuk Staf Taman Nasional Siberut. Kedua pelatihan ini sangat penting untuk dilaksanakan terutama bagi staf BTNS yang terbiasa menggunakan pendekatan hukum positif dan kurang memahami konteks kebudayaan masyarakat Mentawai yang berada di dalam dan sekitar kawasan BTNS.

Dampak terhadap project ini adalah kurangnya internalisasi proses kolaborasi BNTS dengan masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh staf BTNS di lapangan masih berpotensi pada pendekatan keamanan dan bukan pendekatan persuasif. Kemampuan analisa staf BTNS juga relatif terbatas dan karena itu menyulitkan implementasi program-program kerjasama BTNS dan CBO di lapangan.

V. SAFEGUARD POLICY ASSESSMENTS

Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.

Melalui project ini, inisiatif kolaborasi konservasi antara masyarakat dan Balai Taman Nasional Siberut (BTNS) mendapat dukungan kebijakan dari Departemen Kehutanan. Direktur Jenderal PHKA, melalui surat no S 880/W-KK/2006, meminta kepala BTNS untuk proaktif melakukan koordinasi dan promosi pulau Siberut sebagai Cagar Biosfer dan mengembangkan praktek-praktek kolaborasi dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional. Dukungan kebijakan tersebut sangat besar artinya bagi pengembangan inisiatif model kolaborasi konservasi di Siberut. Selama ini, melalui *project* Kolaboratif Manajemen (Ko-Manajemen) Siberut, kolaborasi antara masyarakat, LSM dan BTNS tidak mendapat dukungan resmi dari Departemen Kehutanan—yang memiliki otoritas dalam pengelolaan Taman Nasional Siberut.

Dukungan dari PHKA tersebut kemudian menjadi pijakan bagi BTNS untuk mengeluarkan secara resmi surat dukungan lembaga secara resmi untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Surat bernomor KT 206b/IV.T.2/TU/2006, yang ditandatangani oleh Kepala BTNS menyatakan dukungan secara penuh BTNS terhadap keberlanjutan mekanisme kolaborasi BTNS dengan masyarakat. Dukungan secara resmi merupakan pernyataan pertama kalinya dari BTNS secara resmi untuk mendukung usaha kolaborasi antara masyarakat dan BTNS.

Project ini berhasil memfasilitasi terbentuknya Perkumpulan Siberut Hijau yang disingkat PASIH. Pasih telah mendapatkan badan hukum lembaga sejak tanggal 24 Mei 2007 dengan nomor akta No. 10 yang dibuat dihadapan Notaris/P.P.A.T RISMADONA, S.H. dan terdaftar pada panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang No 04/2007 sesuai dengan SK MENKEH NO. C-872.HT.03.01-1999. PASIH merupakan wadah bagi masyarakat Siberut dan eksponen project Ko-Manajemen di Siberut untuk berkolaborasi dengan BTNS. PASIH, yang merupakan transformasi dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam ko-manajemen, membawa pendekatan kolaboratif dan memiliki status hukum yang lebih kuat. PASIH masih membawa misi konservasi dan satu prinsip dengan pentingnya pembaharuan mekanisme kerjasama dan birokrasi di tubuh TNS.

Melalui PASIH, masyarakat Siberut sudah memiliki wadah/lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan karena memudahkan proses negosiasi masyarakat dengan komponen kunci konservasi pulau Siberut seperti Pemerintah Daerah dan BTNS. Posisi PASIH dan BTNS menjadi lebih seimbang dan ini memudahkan proses integrasi program PASIH dengan program BTNS. Dengan menjadi lembaga tersendiri, proses kolaborasi dengan BTNS akan dapat dikerangkai dengan sebuah nota kesepahaman (MoU, *memorandum of understanding*) yang dirumuskan bersama, yang selama ini tidak pernah didapatkan masyarakat. Dengan MoU, kekuatan negosiasi masyarakat terhadap komponen konservasi di Siberut akan meningkat karena MoU dapat digunakan sebagai mandat untuk mewakili masyarakat dalam bekerjasama dengan BTNS atau Pemda.

VI. LESSONS LEARNED FROM THE PROJECT

Describe any lessons learned during the various phases of the project. Consider lessons both for future projects, as well as for CEPF's future performance.

Terdapat perubahan perilaku—meskipun tidak untuk semua staf—di BTNS menyangkut sikap-sikap dalam bekerjasama dengan pihak luar. Beberapa staf TNS sangat proaktif dalam merumuskan agenda-agenda kolaborasi. Beberapa kegiatan yang tercakup dalam project ini, termasuk Draft MoU kesepakatan kerjasama, studi banding dan beberapa pelatihan antara BTNS dan PASIH disiapkan oleh staf BTNS. Dengan demikian project ini telah meletakkan dasar-dasar kolaborasi antara masyarakat dan BTNS di Siberut dan juga membawa perubahan-perubahan perilaku di birokrasi BTNS secara signifikan.

Secara internal, dukungan kerjasama dari organisasi pemerintah secara institusional terhadap program ini sangat tergantung dari komitmen para pimpinan dan staf senior. Mayoritas staf BTNS tidak memiliki pengalaman bekerja sama dengan *stakeholder*. Mereka juga tidak memiliki skill dan pengetahuan dalam menjalankan kemitraan. Kebanyakan staf menggunakan gaya lama birokrasi yang bersifat tertutup, mengabaikan keuntungan dan peluang bekerjasama dengan komponen konservasi lain di Siberut.

Sebagian besar staf melihat kecenderungan kepala Balai. Jika pimpinan BTNS tidak pro-aktif dalam mendukung kerja kolaborasi, maka seluruh staf akan menunggu tanpa membuat inovasi atau inisiatif. Sepanjang pelaksanaan kolaborasi ini, sebagian besar staf mengerti dan memahami keunggulan kerja-kerja kolaborasi. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk menunggu perintah dari pimpinan.

Proses kolaborasi program di BTNS akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kapasitas para pelaku konservasi. Untuk menggalang dukungan yang luas dari staf-staf yang lain, perlu diupayakan untuk meningkatkan kapasitas pada lapisan kedua (*second layer*) kepemimpinan BTNS. Sudah menjadi kelaziman kerja-kerja kolaborasi selalu dimulai dari inisiatif dari komitmen beberapa staf yang terbatas dan terlibat secara langsung dalam program ini dengan jumlah terlalu sedikit dibandingkan staf BTNS keseluruhan.

Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/failure)

Proses penyusunan project ini melibatkan BTNS dan CBO. Project ini harus mengakomodasi kepentingan keduanya. Sehingga kegiatan yang dilakukan relatif padat untuk dikerjakan selama 8 bulan dengan 4 output level. Mengingat kondisi geografis dan waktu pelaksanaan kegiatan BTNS yang lain—pengamanan, patroli polisi kehutanan, agenda pertemuan dengan PHKA—menyebabkan ada sebagian kecil kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Meskipun demikian proses yang transparan dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak menyebabkan project ini berlangsung sangat konstruktif. Dalam pengertian BTNS dan CBO sama-sama pro-aktif dalam melaksanakan kegiatan. Desain project yang menguntungkan CBO dan BTNS menyebabkan beberapa kegiatan melebihi ekspektasi. Pimpinan BTNS dan staf senior sangat mendukung dan memberi jaminan akan keberlangsungan kolaborasi antara BTNS dan masyarakat Siberut.

Project Execution: (aspects of the project execution that contributed to its success/failure)

Implementasi kerja kolaborasi mensyaratkan adanya dukungan kapasitas implemendor yang memiliki kecakapan bernegosiasi, bekerja dalam tim, dan inovasi dalam mensiasati keterbatasan birokrasi. Syarat utama ini tidak bisa dipenuhi oleh BTNS. Seringkali juga terdapat kecenderungan bahwa mekanisme kolaborasi diinterpretasikan sebagai wahana untuk menarik keuntungan mendapatkan insentif langsung diluar hak-hak sebagai staf BTNS. Jika koordinasi di institusi pemerintah tidak baik akan mudah bagi beberapa staf yang berusaha mengambil keuntungan tersendiri untuk merusak kepercayaan yang tengah dibangun

VII. ADDITIONAL FUNDING

Provide details of any additional donors who supported this project and any funding secured for the project as a result of the CEPF grant or success of the project.

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes

***Additional funding should be reported using the following categories:**

- A** *Project co-financing (Other donors contribute to the direct costs of this CEPF project)*
- B** *Complementary funding (Other donors contribute to partner organizations that are working on a project linked with this CEPF project)*
- C** *Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project.)*
- D** *Regional/Portfolio leveraging (Other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project.)*

Provide details of whether this project will continue in the future and if so, how any additional funding already secured or fundraising plans will help ensure its sustainability.

VIII. ADDITIONAL COMMENTS AND RECOMMENDATIONS

Proses kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi dapat mengubah watak dan perilaku birokrasi lembaga pemerintah yang pengelolaannya terpusat—seperti BTNS. Perubahan ini, meskipun berlangsung sangat pelan dan membutuhkan proses yang panjang memberi harapan bahwa pengelolaan kawasan konservasi yang didukung oleh masyarakat tidak mustahil diwujudkan dan menjadikan tantangan bagi pelaku konservasi. Watak birokrasi yang kaku, terpusat, tidak partisipatif dapat berubah dengan kreatifitas dan skil yang tinggi serta komitmen yang tinggi dari staf lembaga pemerintah.

Lembaga pemerintah adalah pihak kunci karena mereka memiliki otoritas yang kuat dan memiliki mandat dari negara untuk mengelola konservasi. Lembaga donor seperti CEPF harus bisa mengidentifikasi partner-partner kunci di pemerintah sementara implementor project harus jeli dan cerdas menganalisa staf-staf di lingkungan birokrasi konservasi untuk dikelola potensinya. Kombinasi dari investasi yang efisien dan implementasi di lapangan yang kontekstual akan membuat project-project konservasi memiliki nilai tambah.

Untuk kasus konservasi di pulau Siberut, investasi yang efektif tidak melibatkan pendanaan yang relatif besar. Pendanaan yang kecil tapi sesuai dengan kebutuhan lapangan dan memiliki komitmen jangka panjang akan membantu lembaga konservasi dari pemerintah untuk senantiasa belajar dari fleksibilitas mitra, membantu masyarakat untuk percaya akan konsistensi pihak konservasionis, dan terus menerus menjaga proses negosiasi dengan pihak-pihak yang berorientasi pengelolaan ekonomi tanpa memikirkan prinsip-prinsip pelestarian.

VIII. INFORMATION SHARING

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. One way we do this is by making programmatic project documents available on our Web site, www.cepf.net, and by marketing these in our newsletter and other communications.

These documents are accessed frequently by other CEPF grantees, potential partners, and the wider conservation community.

Please include your full contact details below:

Name: Darmanto

Organization name: Perkumpulan Siberut Hijau (PASIH)

Mailing address: Kompleks Taman Nasional Siberut, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat

Tel: (0759) 21109

Fax: (0759) 21109

E-mail: elagatsitulolo@yahoo.co.id, darmantosimaepa@yahoo.com